

DARI STEREOTIP ETNIS KE KONFLIK ETNIS

Sarlito Wirawan Sarwono

Abstrak

Pada tahun 1979, Suwarsih Warnaen meraih gelar doktor psikologi dengan mengajukan disertasi berjudul "Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multi Etnis" (Warnaen, 2002), sebuah penelitian yang dapat dikatakan sebagai yang pertama dalam bidang etno-psikologi di Indonesia. Ketika hasil penelitian itu dipaparkan dalam sebuah seminar di Jakarta, Warnaen mendapat tentangan keras dari salah satu etnik. Suatu indikator bahwa, walaupun pada masa itu belum menonjol, di masa-masa sesudahnya konflik antar etnik dapat menjadi masalah yang serius.

Pada tahun 1999, di Kalimantan Barat, pecah konflik antara etnik Madura melawan etnik Melayu dan Dayak yang berlangsung selama lebih dari dua tahun dan meminta ratusan korban jiwa dan ribuan pengungsi. Sebuah penelitian lain kemudian dilaksanakan pada tahun 2001 oleh Prawasti, Fatmawati dan kawan-kawan (dilaporkan 2002) terhadap sistem nilai motivasi yang terdapat pada ketiga etnik yang terlibat pertikaian tersebut tersebut.

Dalam makalah ini dibahas beberapa stereotip tahun 1979 yang ditemukan Warnaen, yang ternyata tidak seluruhnya sesuai dengan realita pada tahun 2001 dan temuan nilai-nilai motivasi tahun 2001 yang juga tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Perbandingan antar kedua penelitian dan diskusi tentang kontroversi memicu pemikiran tentang perlunya dikembangkan metode-metode penelitian dan teori-teori etno-psikologi yang lebih sesuai dengan kondisi berbagai etnik di Indonesia, maupun bangsa Indonesia itu sendiri.

Pendahuluan

Konflik antar etnik, di samping konflik antar agama, sudah menjadi masalah yang kronis sejak awal kemerdekaan. Kerusakan yang dilatarbelakangi kecemburuan sosial terhadap etnik Cina sudah berkali-kali terjadi. Salah satu diantaranya yang tergolong besar dan memakan korban jiwa dan materi sangat banyak adalah yang terjadi di Jawa Tengah pada tahun 1980.

Peristiwa PRRI/Permesta (Sumatera dan Sulawesi) di tahun 1950-an, kasus Timor Timur, GAM (Aceh) dan

GPM (Papua) di tahun 1990-an, walaupun banyak nuansa politiknya, namun juga tidak bisa dilepaskan dari unsur etnik, karena pembagian wilayah administrasi (propinsi, kabupaten) di Indonesia disesuaikan dengan wilayah etnik masing-masing. Bahkan di tahun 1996 beberapa kerusakan yang terjadi (antara lain yang dikenal sebagai kasus Sidoarjo dan kasus Rengasdengklok) merupakan kombinasi antara konflik antar etnik dan antar agama.

Di Kalimantan Barat, kerusakan antar etnik Madura melawan etnik Dayak sudah berkali-kali terjadi sejak

tahun 1930-an dan pada tahun 1990-an berkembang menjadi melawan etnik Melayu juga, bahkan pada tahun 2001 sudah menyebar juga ke propinsi Kalimantan Selatan.

Menyadari potensi konflik etnik yang bisa pecah sewaktu-waktu ini, Suwarsih Warnaen melakukan penelitian tentang stereotip beberapa etnik di Indonesia dan stereotip bangsa Indonesia itu sendiri, yang kemudian dijadikannya disertasi untuk meraih gelar doktornya pada tahun 1979 (diterbitkan sebagai buku pada tahun 2002) dan sebagian dari temuannya dipublikasikan sebagai salah satu *chapter* dalam buku "*Social Identity and Intergroup Relations*" (Jaspars & Warnaen, 1982).

Upaya kajian etno-psikologi bangsa Indonesia ini memang bukan yang pertama kalinya. Muchtar Lubis juga pernah menerbitkan buku berjudul "Manusia Indonesia" (1972) yang berisi analisis deduktif tentang sifat-sifat bangsa Indonesia. Walaupun demikian, disertasi Warnaen dapat disebutkan sebagai penelitian yang pertama dalam bidang etno-psikologi karena dilakukan secara induktif-empirik dan dengan metode-metode ilmu pengetahuan yang baku dan bisa dipertanggungjawabkan. Perlu disebutkan, buku yang ditulis Muchtar Lubis bahkan sama sekali tidak tercantum dalam "daftar pustaka" maupun "daftar pustaka tambahan" dari disertasi Suwarsih.

Sebagai sebuah penelitian yang menyangkut masalah yang peka di kalangan masyarakat (ketika itu dikenal dengan istilah SARA: suku, agama, ras, antar golongan), tidak mengherankan ketika hasil penelitian ini dipaparkan dalam sebuah seminar di Jakarta, timbul reaksi negatif dari salah satu etnik (Minangkabau) karena disebutkan stereotip negatif (pelit) pada suku bangsa itu. Hal ini menunjukkan gejala adanya masalah etnik yang cukup serius, namun masih laten, dan masyarakat belum siap untuk

menerimanya.

Di kemudian hari, dimulai dari tahun 1996, secara sporadis di Jawa dan mencapai puncaknya di Kalimantan Barat, konflik etnis meledak menjadi kerusuhan besar yang hampir tidak terkendali, bahkan sudah timbul perilaku sadis (penggal kepala dan lain-lain), walaupun sejauh ini belum melibatkan suku Minangkabau sendiri.

Penelitian Stereotip Etnik

Penelitian Warnaen dipicu oleh kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multi etnik (Koentjaraningrat, 1969) dan bahwa saling kecurigaan bisa menghambat integrasi (Koentjaraningrat, 1976). Selain itu, ia juga mengutip Triandis (1972) yang mengatakan bahwa "sebagian besar konflik antar golongan yang telah terjadi diakibatkan oleh kultur subyektif yang berbeda-beda" (Warnaen, 2002: 52).

Sementara itu, dengan masih tetap mengutip Triandis, Warnaen mensinyalir bahwa:

"...seperti halnya di Indonesia, sampai permulaan tahun 1960-an berbagai studi yang mencari, mengukur dan menyajikan stereotip, jarak sosial dan hal-hal lain yang serupa, dianggap akan meningkatkan konflik. Baru pada akhir tahun 1960, orang mulai sadar bahwa konflik tidak bisa direduksi dengan tidak menghiraukannya..., melainkan dengan jalan mempelajari, menganalisis dan memahaminya. Sekarang sudah waktunya, untuk menghadapi masalah perbedaan kultur secara terbuka" (Warnaen, 2002: 52-53).

Adapun unsur-unsur terpenting dari kultur subyektif yang disusun oleh Triandis adalah: (1) kategorisasi (konsep), (2) evaluasi, (3) asosiasi dan struktur kognitif elementer, (4) keyakinan atau percaya, (5) sikap, (6) stereotip, (7) harapan, (8) norma, (9) ideal, (10) peranan, (11) tugas, dan (12) nilai-nilai (Warnaen, 2002: 55).

Dari keduabelas unsur itu, Triandis berpendapat bahwa "stereotip adalah konsep sentral, sedangkan kategori merupakan unsur dasar lain yang penting" (Warnaen, 2002: 56). Karena itulah, Warnaen memfokuskan penelitiannya pada stereotip.

Selanjutnya, dalam publikasinya bersama Jaspars, Warnaen juga berargumentasi bahwa pengukuran stereotip ini sejalan dengan teori tentang konflik yang sedang berkembang pada waktu itu, yaitu teori Tajfel (1978; Tajfel *et al.*, 1971; Billig & Tajfel, 1973), yang mengatakan bahwa prasangka dan diskriminasi yang seringkali merupakan sumber konflik antar kelompok disebabkan oleh kategorisasi sosial, identitas sosial dan perbandingan sosial (Jaspars & Warnaen, 1982: 136). Sedangkan model perbandingan antar kelompok, yang dalam penelitian ini dilakukan antar etnik, telah dibuktikan kesahihannya dalam disertasi van Knippenberg (1978a, b).

Penelitian itu sendiri didasarkan pada 37 hipotesis yang dibagi dalam 3 golongan hipotesis dasar, yaitu hipotesis kontak, hipotesis dimensi, hipotesis integrasi, dan satu golongan hipotesis khusus (Warnaen, 2002: 148-153). Subyek penelitian berjumlah 1.291

siswa SMA kelas III, berusia 16-20 tahun dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Sebagian, 591 subyek, adalah siswa dari Jakarta, sedangkan 700 sisanya non-Jakarta.

Subyek luar Jakarta terdiri dari tujuh suku bangsa yang masing-masing mewakili daerahnya sendiri (Sunda, Jawa, Minangkabau, Batak, Bugis-Makassar, Minahasa, dan Maluku). Sedangkan subyek Jakarta terdiri dari enam suku bangsa (minus Bugis-Makassar), ditambah dengan etnik Cina, etnik lain-lain dan empat golongan campuran, sehingga subyek Jakarta terdiri dari 12 kelompok etnik dan jumlah kelompok yang diteliti seluruhnya adalah 19 (Warnaen, 2002: 155).

Instrumen pengumpulan data yang dipakai terdiri dari 4 jenis materi, yaitu (1) daftar pertanyaan kesamaan, (2) daftar pertanyaan stereotip, (3) daftar pertanyaan nilai sifat khas dan (4) daftar pertanyaan kontak (Warnaen, 2002: 160).

Hasil Penelitian Stereotip Etnik

Ringkasan temuan penelitian Warnaen sebagaimana dilaporkan dalam artikel bersama Jaspars & Warnaen (1982) terbaca dalam tabel 1.

Table 1. *Stereotypes of ethnic groups in Indonesia shared by the majority of ethnic groups (Warnaen, 1979)*

<i>Sundanese</i>		<i>Javanese</i>		<i>Minangkabau</i>	
polite	17	polite	17	Loyal to family	17
friendly	17	honest	14	Old fashioned	14
Good natured	16	traditional	14	traditional	14
honest	13	friendly	14	stingy	14
hospitable	13	old fashioned	11	deceitful	13
opinionated	10	superstitious	11		
materialistik	10	good natured	11		
neat	10	industrious	10		
<i>Tapanuli</i>		<i>Makassarrese</i>		<i>Minahassans</i>	
emotional	17	emotional	17	pleasure loving	17
pleasure loving	17	rude	16	fond of parties	15
loyal to family	17	loyal to family	15	aggressive	13
quick tempered	17	Quick tempered	15	gregarious	12
stubborn	11	Old fashioned	14	polite	10

gregarious	11	traditional	13	hospitable	10
		polite	13	happy go lucky	10
		ambitious	10		
		deceitful	10		
		industrious	10		
<i>Moluccans</i>		<i>Chinese</i>		<i>Indonesians</i>	
fond of parties	16	deceitful	18	polite	19
rude	16	stingy	18	imitative	18
gregarious	16	industrious	17	friendly	18
emotional	14	suspicious	13	hospitable	17
aggressive	12	slovenly	13	traditional	17
ambitious	12	loyal to family	10	honest	14
quick tempered	12			loyal to family	14
happy go lucky	10			nationalistic	14
loyal to family	10				
<i>Jakartans</i>		<i>Self</i>			
humoristic	16	honest	19		
polite	13	opinionated	19		
fond of parties	12	polite	18		
old fashioned	11	hospitable	17		
friendly	11	humouristic	17		
aggressive	10	reliable	14		
hospitable	10	happy go lucky	11		
bad	10				
happy go lucky	10				

The figures indicate the number of groups (maximum 19) for which a trait is included in the stereotype.

Sumber: Jaspars & Warnaen, 1982: 350

Yang menarik dari tabel di atas adalah, bahwa secara umum bangsa Indonesia distereotipkan sebagai mempunyai beberapa sifat yang positif, tetapi dalam kenyataan pasca reformasi (setelah 1998) justru tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Kejujuran, misalnya, yang juga dinyatakan sebagai sifat utama bagi diri subyek sendiri dan etnik Jawa dan Sunda, tidak sesuai dengan kenyataan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang paling korup di dunia. Demikian juga nasionalisme, tidak sesuai dengan fakta perihal adanya beberapa propinsi (Aceh, Papua, Riau) yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Indonesia.

Hal menarik lainnya adalah bahwa bangsa Indonesia tidak dianggap sebagai bangsa yang agresif. Dalam tata urut sifat khas gabungan etnik yang

diteliti, sifat-sifat yang secara potensial dapat menyebabkan konflik terletak pada urutan yang relatif rendah, antara lain agresif (urutan 10, dari 62 sifat), emosional (15), kasar (18), cepat marah (21), curiga (25), kepala batu (28), dan radikal (46) (Warnaen, 2002: 195). Padahal, kenyataan menunjukkan ada banyak kerusuhan, konflik, kejahatan, unjuk rasa, main hakim sendiri dan sebagainya, yang ditandai dengan kekerasan sampai tingkat sadistik (kepala dipenggal di Kalimantan Barat, tukang copet dibakar hidup-hidup dsb.), yang meminta korban ribuan nyawa sejak tahun 1998 sampai saat tulisan ini dibuat.

Sebaliknya, etnik Batak yang distereotipkan sebagai emosional, cepat tersinggung dan keras kepala, justru hampir tidak pernah terlibat dalam konflik dengan kekerasan yang serius.

Di sisi lain, orang Maluku memang terlibat konflik berkepanjangan (sejak 1999 sampai saat tulisan ini dibuat), dalam tabel di atas pun diberi stereotip kasar, emosional, agresif, dan cepat tersinggung serta tidak dianggap religius. Padahal, dalam kenyataannya, konflik mereka justru bukan antar etnik, melainkan antar pemeluk agama yang berbeda dalam etnik yang sama.

Demikian pula sifat sangat religius gabungan etnik-etnik terdapat pada urutan ke 34, sementara konflik dan teror di Indonesia (termasuk bom Bali 12 Oktober 2002, bom malam Natal di Jakarta 2000 dan bom malam Idul Fitri di Makasar 2002) justru dilakukan oleh kelompok religius yang radikal, yaitu stereotip pada urutan 46 (Warnaen, 2002: 195).

Tetapi, terlepas dari stereotip masing-masing etnik dan bangsa Indonesia sebagai keseluruhan, Warnaen menyimpulkan dari data penelitiannya tentang kontak antar etnik, sebagai berikut:

"Kontak ternyata berpengaruh, baik terhadap beberapa dimensi stereotip maupun terhadap persepsi kesamaan. Semakin banyak terjadi kontak, isi stereotip semakin jelas dan semakin seragam, tetapi preferensi etnis tidak selalu menjadi semakin positif, bahkan bisa menjadi semakin negatif. Semakin banyak terjadi kontak, golongan etnis yang daerah asalnya berdekatan atau menganut agama yang sama, semakin dipersepsi sama.

Rasa kesukubangsaan dari setiap golongan subjek, yang ternyata lebih kuat daripada rasa kebangsaannya, tidak dipengaruhi oleh bertambahnya kontak yang terjadi antar golongan etnis. Bila isi stereotip tentang dua golongan etnis berbeda banyak, akan terjadi gejala kontradiktif, yaitu bahwa kedua golongan etnis itu akan melihat satu sama lain sangat berbeda, melebihi perbedaan yang sebenarnya. Sebaliknya, bila isi stereotip tentang dua golongan sedikit sekali perbedaannya, kedua golongan etnis itu

akan melihat satu sama lain sama" (Warnaen, 2002: 405-406)

Penelitian Konflik Etnik

Konflik antara tiga etnik di Kalimantan Barat (Dayak dan Melayu versus Madura) mencapai puncaknya pada tahun 1999 dan 2000, dengan ribuan orang terbunuh secara sangat kejam, harta-benda dan hak milik musnah dibakar, dijarah atau dirusak dan ratusan ribu jiwa dari etnik Madura sampai saat tulisan ini dibuat masih terlunta-lunta sebagai pengungsi di berbagai pusat pengungsian (Singkawang, Pontianak, Surabaya dan pulau Madura sendiri). Mereka juga menjadi beban untuk pemerintah, baik karena harus menyediakan milyaran rupiah untuk bantuan hidup mereka, maupun karena harus menghadapi tekanan politik sehubungan dengan isu pengungsi ini.

Sekarang, tiga tahun kemudian, masalah pengungsi ini belum juga selesai. Bahkan sempat meluas ke Sampit, Kalimantan Tengah. Di lokasi-lokasi kerusuhan itu sendiri, khususnya di Kabupaten Sambas (mayoritas etnik Melayu) dan Kabupaten Bengkayang (Dayak), keadaan memang sudah aman dan terkendali, namun tanpa etnik Madura sama sekali. Beberapa orang Madura yang mencoba pulang kampung untuk menengok bekas rumah atau kebunnya, ternyata tidak pernah kembali. Masyarakat di dua daerah itu (dan ini berlaku juga untuk Sampit), menyatakan bahwa mereka tidak mau ada orang Madura lagi di daerah mereka sampai 25 tahun ke depan.

Tetapi kalau melihat sejarahnya, pertikaian etnik ini memang sudah berjalan sejak 1933. Menurut catatan yang dibuat oleh D. Ramadhan (2001), sudah terjadi 14 kali kerusuhan besar sejak 1950 saja; kebanyakan adalah Madura versus Dayak. Tetapi, dua kali konflik yang terbesar (1999 dan 2000) justru terjadi saat Madura melawan Melayu (lihat tabel 2)

Tabel 2. Konflik antar-etnik di Kalimantan Barat sejak 1950.

No.	Tahun	Konflik etnik	Lokasi pemicu kejadian
1	1950	Madura vs Dayak	Samalantan (Bengkayang)
2	1967	Madura vs Dayak	Terap Toho, <i>Kabupaten</i> Pontianak
3	1968	Madura vs Dayak	Sungai Pinyuh, <i>Kabupaten</i> Pontianak
4	1976	Madura vs Dayak	<i>Kabupaten</i> Pontianak
5	1977	Madura vs Dayak	Samalantan (Bengkayang)
6	1979	Madura vs Dayak	Samalantan (Bengkayang)
7	1983	Madura vs Dayak	Sungai Ambawang, <i>Kabupaten</i> Pontianak
8	1993	Madura vs Dayak	Kota Pontianak
9	1994	Madura vs Dayak	Tumbang Titi
10	1996-1997	Madura vs Dayak	Sanggau Ledo (Bengkayang)
11	1997	Madura vs Dayak	Kota Pontianak
12	1999	Madura vs Melayu	Parit Setia (Sambas)
13	1999	Madura vs Dayak	Samalantan & Sanggau Ledo (Bengkayang)
14	2000	Madura vs Melayu	Kota Pontianak

(Dikompilasi oleh Rhamadan, D, 2001: 1)

Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa etnik Melayu yang selama ini dikenal sebagai etnik yang taat beragama (Islam), lemah lembut, menyukai seni dan tidak pernah melawan (orang Madura Kalimantan Barat menjuluki mereka, "krupuk"), bisa bertindak lebih kejam daripada orang Dayak yang memang punya stereotip primitif (orang Madura menjuluki mereka, "kafir").

Pertanyaan kedua, mengapa Melayu dan Dayak ini hanya agresif pada Madura, tidak pada, misalkan Cina (yang di Jawa sering menjadi sasaran agresivitas massa dan dalam penelitian Warnaen distereotipkan sebagai pelit dan penuh curiga)? Atau pada orang Jawa (yang jadi sasaran di Aceh, Timtim dan Papua). Atau orang Bugis (yang memicu kerusuhan Ambon, 1999)?

Berbagai teori sudah dikembangkan untuk menjelaskan gejala ini. Yang paling populer adalah teori kesenjangan sosial, karena etnik Madura yang pekerja keras itu memang lebih maju secara sosial-ekonomi ketimbang etnis-etnis yang lain.

Tetapi, secara makro, teori ini kurang pas, karena jumlah etnik Madura di Kalimantan Barat sangat minoritas (1,3%) dan mereka hanya bergerak di sektor perekonomian papan bawah (buruh tani, pekerja kasar, supir/kenek

angkutan umum dan sebagainya). Mereka jelas berbeda dengan etnik Cina di Jawa, yang walaupun minoritas tetapi juga menguasai perekonomian papan atas (bersama konglomerat pribumi juga).

Teori lain dari Al Qadri (1999) mengatakan bahwa etnik Madura selalu menjadi pemicu konflik karena kebiasaan mereka membawa-bawa senjata tajam ke mana pun mereka pergi. Juga karena eksklusivisme mereka sehingga tidak bisa menyatu dengan etnik lainnya (pesantren dan khotbah Jum'at berbahasa Madura dan kiai-kiai dipanggil dari Madura, sehingga orang-orang Melayu tidak bisa beribadah di masjid-masjid Madura). Namun, ternyata, etnik-etnik yang lain pun, di Kalimantan Barat, hidup dalam eksklusivisme masing-masing (Jawa di wilayah transmigrasi, Cina memelihara kientengnya dan sebagainya).

Maka Parsudi Suparlan (1999) menawarkan teori lain, yaitu tidak adanya suatu budaya yang dominan di Kalimantan Barat, sehingga masing-masing etnik terus-menerus mengembangkan adat dan tradisinya masing-masing. Tidak seperti di Jawa Barat (budaya Sunda) atau di Jawa Tengah (Jawa), di mana budaya minoritas, mau tidak mau harus beradaptasi dengan budaya mayoritas.

Di Kalimantan Barat, selama etnik-etnik itu tidak saling bersinggungan secara intensif, maka akan berlangsung koeksistensi damai (seperti antara Dayak, Melayu, Cina dan Jawa). Namun dalam hal etnik Madura, mereka ini bukan hanya bersinggungan secara intensif (mereka bekerja di sektor-sektor pelayanan masyarakat papan bawah), tetapi dalam hubungan antar-etnik itu mereka sering cepat marah dan menghunus senjata tajam. Apalagi orang-orang Madura ini punya julukan-julukan bagi etnik lainnya, yang menurut para pakar (N. Struch & S.H. Schwartz, 1989) di sebut proses dehumanisasi. Artinya, kelompok lain tidak lagi dianggap sebagai manusia. Penjelasan dari teori Suparlan ini nampak seiring dengan kesimpulan Warnaen, bahwa semakin sering kontak antar etnik yang mempunyai streatip yang berbeda, justru akan semakin mempertajam perbedaan dan pada gilirannya bisa menimbulkan konflik.

Teori Nilai Motivasi

Teori yang hendak diuji dalam penelitian tentang konflik etnik di Kalimantan Barat adalah teori Nilai Motivasi yang dikembangkan oleh S.H. Schwartz (1992, 1994). Dalam teorinya, Schwartz mengatakan bahwa ada 56 nilai motivasi yang dapat dikelompokkan dalam 10 nilai motivasi yang lebih besar. Kesepuluh nilai motivasi itu kemudian terpola dalam dalam 2 dimensi, yang masing-masing mempunyai dua kutub.

Dimensi pertama adalah *openness to change* (terbuka pada perubahan) *versus conservatism* (keengganan terhadap sesuatu yang baru). Sedangkan dimensi kedua adalah *self-transcendence* (ingin menyatu dengan yang lain) *versus self-enhancement* (ingin maju sendiri).

Dimensi *openness to change* terdiri dari dua nilai motivasi, yaitu *self direction* (mau mencari jalan sendiri) dan *stimulation* (menerima stimulasi

dari luar). Sedangkan *conservatism* terdiri dari tiga nilai motivasi, yaitu *conformity* (ingin menyesuaikan diri dengan orang lain), *tradition* (adat-isiadat) dan *security* (cari aman).

Dimensi *self transcendence* terdiri dari *universalism* (dunia ini satu) dan *benevolence* (menghargai orang lain) dan *self enhancement* terdiri dari *achievement* (hasrat berprestasi) dan *power* (hasrat berkuasa). Sementara itu, nilai motivasi kesepuluh, yaitu *hedonism* (ingin senang sendiri), terkait dengan dimensi *openness to change* dan *self enhancement*,

Jika melihat teori Schwartz dan menghubungkannya dengan teori-teori antropologik di atas, maka kita tentunya akan menduga bahwa ada perbedaan nilai motivasi antara etnik Madura dengan dua etnik lainnya. Diperkirakan, etnik Madura (tentunya yang ada di Kalimantan Barat) akan lebih menonjol dalam *openness to change* (*self-direction* dan *stimulation*) dan *self-enhancement* (*achievement* dan *power*). Maka untuk menguji perkiraan tersebut, pada tahun 2001, Prawasti & Fatmawati (2002) melaksanakan penelitian di lapangan.

Dengan dibantu oleh sebuah tim dari Fakultas Psikologi UI (terdiri dari 9 mahasiswa, 3 dosen dan 1 mahasiswa S2 Kajian Ilmu Kepolisian UI), mereka meneliti di Kalimantan Barat (Singkawang, Sambas dan Sanggauledo). Tujuannya untuk mengumpulkan data tentang nilai motivasi dari ketiga etnik, dengan menggunakan alat ukur dari Schwartz (yang pernah divalidasi di berbagai negara di seluruh dunia; 1992).

Masing-masing etnik diwakili oleh 130 responden pria, berumur 15-50 tahun (dianggap mewakili pelaku-pelaku langsung kekerasan).

Hasil Penelitian Konflik Etnik

Ternyata, hasil penelitian cukup jauh dari dugaan. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa ketiga etnik itu

mempunyai skala prioritas nilai motivasi

yang sama.

Tabel 3. Urutan Nilai Motivasi

Rank	Dayak	Madura	Melayu	Total
1	Conformity*	Conformity*	Conformity*	Conformity*
2	Security*	Security*	Security	Security*
3	Benevolence*	Benevolence*	Benevolence	Benevolence*
4	Universalism*	Universalism*	Universalism	Universalism*
5	Tradition*	Tradition	Hedonism	Tradition
6	Achievement*	Self Direction	Self Direction	Self Direction
7	Self Direction	Achievement	Achievement	Achievement
8	Stimulation	Power	Tradition	Hedonism
9	Power	Stimulation	Power	Power
10	Hedonism	Hedonism	Stimulation	Stimulation

* Sangat penting

Tabel di atas memperlihatkan bahwa untuk urutan 1 sampai dengan 4, ketiga etnik menempatkan nilai yang sama; yaitu, Konformitas, Keamanan, Baik Kepada Orang lain dan Universalisme. Pada urutan kelima pun masih dua etnik yang menempatkan Tradisi (kecuali Melayu).

Sementara itu, etnik Madura menempatkan Kekuasaan pada urutan ke 8, hanya satu tingkat lebih tinggi dari kedua etnik lain yang menempatkannya pada urutan ke 9. Bahkan dalam hal nilai *achievement* (prestasi), etnik Madura bersama etnik Melayu, menempatkannya pada urutan ke-7, satu tingkat lebih rendah dari pada etnik Dayak.

Dengan demikian, ketiga etnik pada hakikatnya memposisikan *self-enhancement* (yang diduga sebagai nilai yang memicu agresivitas) pada urutan yang relatif rendah.

Diskusi Dan Implikasi

Membandingkan kedua penelitian (Warnaen pada tahun 1979 dan Prawasti & Fatmawati pada tahun 2001), ada satu persamaan yang dapat dikemukakan, yaitu bahwa stereotip maupun nilai motivasi bukan prediktor yang baik bagi timbul atau tidak timbulnya konflik dengan kekerasan atau kekerasan (*violence*) itu sendiri. Bahkan stereotip positif (jujur, ramah) tidak mencerminkan kenyataan (korupsi)

sadis), demikian pula stereotip cepat tersinggung belum tentu berarti pemicu kekerasan (Batak).

Dalam hal nilai motivasi, nilai-nilai yang diduga memicu kekerasan justru ditempatkan di urutan bawah (*self-enhancement*), sementara yang ditempatkan pada urutan teratas (pada ketiga etnik yang diteliti) justru yang awalnya diduga sebagai nilai-nilai non-kekerasan (konformitas, keamanan, baik kepada orang lain dan universalisme).

Temuan yang kontroversial dari kedua penelitian tersebut bisa saja berawal dari validitas atau reliabilitas instrumen penelitian yang rendah. Atau, metode *sampling*-nya yang masih kurang baik. Apalagi untuk orang Indonesia, sangat mungkin masih ada kecenderungan *faking good* (hanya menjawab yang baik-baik saja) dalam hal respons dari subyek.

Namun, terlepas dari kemungkinan *error* metodologi, kesimpulan Warnaen bahwa pengaruh kontak antar etnik sangat dipengaruhi oleh isi stereotip masing-masing etnik, sangat nyata dalam penelitian Prawasti & Fatmawati. Di Kalimantan Barat, etnik Madura mempunyai julukan "kafir" bagi etnik Dayak, sementara etnik Melayu dijuluki "krupuk". Demikian pula etnik-etnik lain menganggap Madura sebagai mau menang sendiri dan cepat sekali mencabut cluritnya.

Jelas bahwa perbedaan stereotip antara etnik Madura dengan kedua etnik lainnya sangat tajam. Suatu hal yang mungkin (masih memerlukan penelitian lebih lanjut) tidak terjadi antara etnik Dayak dengan Melayu dan etnik-etnik lain di Kalimantan Barat (termasuk Cina).

Sementara itu, hasil analisis terhadap temuan di Kalimantan Barat juga menduga bahwa nilai motivasi positif yang ditempatkan pada urutan atas, lebih ditujukan kepada sesama anggota etnik sendiri, mengingat wawasan *universe* subyek yang masih terbatas pada lingkungan etnik sendiri. Jika asumsi ini benar, maka hal ini sejalan dengan teori Tajfel (1971, 1978) tentang kategorisasi sosial, identitas sosial dan perbandingan sosial sebagai sumber diskriminasi konflik antar kelompok.

Oleh karena itu, sebagai implikasi dari temuan kedua penelitian tersebut, dunia psikologi di Indonesia perlu mulai mengembangkan cabang psikologi etnik (etno-psikologi), atau psikologi antarbudaya dan melakukan penelitian-penelitian serius terhadap konstelasi berbagai suku bangsa yang ada.

Sangat boleh jadi, selama ini pun sudah terdapat beberapa penelitian seperti itu, antara lain: penelitian etno-psikologi suku Amungme dan Kamoro di Mimika, Papua (Sarwono, 1997). Namun penelitian-penelitian itu masih terserak-serak dan perlu dikonsolidasikan secara cermat agar kita lambat laun mempunyai peta psikologi dari berbagai etnik yang ada di Indonesia.

Secara ilmiah, khususnya pada sisi metodologisnya, peta psikologi etnik ini memungkinkan dilakukannya verifikasi berbagai metode etno-psikologi dan pengujian validitas dan reliabilitas masing-masing pada masing-masing etnik. Selain itu, pada sisi praxisnya, peta psikologi memungkinkan para pengambil keputusan untuk memperhatikan aspek-aspek psikologi dalam pertimbangan mereka sebelum

mengambil suatu keputusan atau menerapkan suatu kebijakan.

Sebagai contoh: penerapan UU no 5/1979 tentang penyeragaman sistem administrasi negara, telah menimbulkan terkikisnya adat *pela gandong* pada suku Ambon, sehingga tidak dapat difungsikan lagi untuk mencegah atau meredam kerusuhan antar agama yang terjadi sejak 1999. Contoh lain: transmigran asal Jawa, Bali dan pulau-pulau padat penduduk lainnya, tidak diberi program yang memungkinkan mereka ber-akulturasi atau ber-inkulturasi dengan etnik lokal, sehingga ketika kerusuhan di Aceh terjadi, misalnya, para transmigran Jawa-lah yang pertama kali harus mengungsi, bahkan ada yang menjadi korban.

Sangat bisa diharapkan bahwa jika etno-psikologi telah berkembang, kasus-kasus seperti itu akan bisa sangat dikurangi.

Daftar Pustaka

- Al Qadrie, S.I. (1999). Konflik etnik di Ambon & Sambas: Suatu tinjauan Sosiologis, *Jurnal Antropologi Indonesia*, 58, 36-57
- Billig, M. & Tajfel, H. (1973). Social categorization and similarity in Intergroup behavior, *European Journal of Social Psychology*, 3, 27-52
- Jaspars, J.M.F. & Warnaen, S. (1982). Intergroup relations, ethnic identity and self-evaluation in Indonesia, in H. Tajfel (ed) *Social Identity and Intergroup Relations*, London: Cambridge University Press
- Knippenberg, A. Van. (1978a). Perception and evaluation of intergroup differences, *Unpublished PhD thesis*, University of Leiden
- Knippenberg, A. Van, (1978b). Status difference, comparative relevance and intergroup differentiation, in H. Tajfel, *op. cit.*

- Koentjaraningrat. (1969). *Atlas Etnografi Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. (1976). Kecurigaan adalah hambatan bagi integrasi, *Prisma*, Vol 5, No. 8, 44-48
- Prawasti, Y.C. & Fatmawati, S. (2002). Profil Psikologi Tiga Kelompok Etnik yang Bertikai di Kalimantan Barat: tinjauan berdasarkan teori sistem nilai, jarak sosial dan tingkah laku antar kelompok, laporan penelitian Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Rhamadan, D. (2001). *Perbedaan prioritas tipe nilai motivasional orang Dayak dengan orang Madura di Kalimantan Barat: Studi deskriptif pada orang Dayak di Kecamatan Sanggau Ledo dan orang Madura di Kecamatan Roban, Kalimantan Barat*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia
- Sarwono, S.W. (1997). The Amungme and The Kamoro in Mimika Timur, a psychological analysis, in J. Miedema, C. Ode & RAC Dam *Perspectives on the Bird's Head of Irian Jaya, Indonesia*, Amsterdam, Editons Radopi BV: 361-363
- Schwartz, S.H. (1992). Universals in the context and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries, in M. Zanna (ed) *Advances in Experimental Social Psychology*, vol. 25, (pp. 1-65), New York: Academic Press.
- Schwartz. S.H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human value? *Journal of Social Issues*, 50 (4), 19-45
- Struch, N. & Schwartz, S.H. (1989). Intergroup aggression: Its predictors and distinctness from in-group bias, *Journal of Personality and Social Psychology*, 56 (3), 364-373
- Suparlan, P. (1999). Kemajemukan, hipotesis kebudayaan dan kesukubangsaan, *Jurnal Antropologi Indonesia*, 58, 13-20.
- Tajfel, H. (ed). (1978). *Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations*, European Monographs in Social Psychology, No 14 No 14, London: Academic Press
- Tajfel, H., Flament, C., Billig, M & Bundy, R. (1971). Social categorization and intergroup behavior, *European Journal of Social Psychology*, 1, 149-75.
- Triandis. H. (1972). *Analysis of Subjective Culture*, New York: Willey
- Warnaen, S. (2002). *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis*, Jakarta: Mata Bangsa